



Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) PT Ceria Nugraha Indotama (CNI) dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka

<u>INFO PENULIS</u>	<u>INFO ARTIKEL</u>
Dewi Sarmila Universitas Sembilanbelas November Kolaka dewisarmilasamir4@gmail.com	ISSN: 2963-8933 Vol. 6, No. 1, April 2026 http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajpp
I Rawati Universitas Sembilanbelas November Kolaka irawati880@ymail.com	
Ahmad Farouq Mulku Zahari Universitas Sembilanbelas November Kolaka ahmadfarouqmulku@gmail.com	
Arafat Mallapiseng Universitas Sembilanbelas November Kolaka afatpascaunm@gmail.com	

© 2026 Arden Jaya Publisher All rights reserved

Saran Penulisan Referensi

Sarmila, D., Rawati, I., zahari, A. F. M., & Mallapiseng, A. (2026). Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) PT Ceria Nugraha Indotama (CNI) dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka. *Arus Jurnal Psikologi dan Pendidikan*, 6 (1), 743-751.

Abstrak

Artikel ini merupakan luaran penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan Efektivitas Program Pengembangan Dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) PT CNI dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat di kecamatan Wolo kabupaten Kolaka. Metode penelitian yang di gunakan adalah pendekatan kualitatif dengan pendekatan deskriptif, jenis data yaitu data primer yang di kumpulkan dari hasil wawancara dan observasi, adapun data sekundernya di kumpulkan melalui metode studi dokumentasi. Wawancara dilakukan terhadap beberapa informan yang di tentukan dengan teknik purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas PT. Ceria Nugraha Indotama terkait dengan penerapan program pengembangan dan Pemberdayaan masyarakat, terdapat delapan program kerja yang dijalankan dengan baik program PPM CERIA diantaranya program kesehatan yakni Pemberian Makanan tambahan kepada Ibu hamil, Anak Balita serta para lansia di 8 posyandu Ring 1 dan Pemberian PMT ++ berupa Susu Ibu hamil, Susu ibu menyusui, Susu / biscuit bagi Balita dan Susu bagi lansia, program pendidikan yakni Program pemberian Beasiswa kepada siswa tingkat / setingkat SD, SMP, SMA dan S1 & Program pelengkapan sarana dan prasarana baca Perpustakaan SMA Wolo, dan program kemandirian Ekonomi, Program pemberian alat pertanian: Handtraktor serta sprayer penyemprot hama dan sarana bagi petani: Sanggar Tani, Pengiriman mobil uji tanah untuk memberikan petani pengetahuan mengenai keadaan tanah dan kadar pupuk yang tepat serta Pembinaan UMKM Madu Trigona.

Kata Kunci: Program, Pengembangan, Pemberdayaan, Kesejahteraan Masyarakat

Abstrack

This article is the output of research aimed at describing the Effectiveness of the Community Development and Empowerment Program (PPM) of PT CNI in improving community welfare in Wolo sub-district, Kolaka Regency. The research method used is a qualitative approach with a descriptive approach, and the type of data is primary data collected from the results of interviews and observations. The secondary data was collected through the documentation study method. Interviews were conducted with several informants determined using purposive sampling techniques. The research results show that the effectiveness of PT. Ceria Nugraha Indotama regarding the implementation of community development and empowerment programs includes eight work programs that are well executed in the CERIA PPM program, including health programs, namely providing supplementary food to pregnant women, toddlers, and the elderly at 8 posyandu Ring 1 and giving PMT++ in the form of milk for pregnant women, milk for breastfeeding mothers, milk/biscuits for toddlers, and milk for the elderly; educational programs, namely scholarship programs for students at elementary, junior high, senior high, and undergraduate levels, and programs to complete library facilities and infrastructure at SMA Wolo; and economic independence programs. Agricultural equipment provision program: Hand tractors and pest spraying sprayers, and facilities for farmers: Farmer's Workshops, the delivery of soil testing vehicles to provide farmers with knowledge about soil conditions and appropriate fertilizer levels, as well as the development of Trigona honey MSMEs.

Keywords: Program, Development, Empowerment, Community Welfare

A. Pendahuluan

Pengembangan masyarakat adalah proses penguatan masyarakat secara aktif dan berkelanjutan berdasarkan prinsip keadilan sosial, partisipasi dan kerjasama yang setara. Pengembangan masyarakat tergantung pada inisiatif dan kemampuan masyarakat lokal dalam menentukan alternatif pemecahan masalah. Kemampuan ini ditunjang oleh keterlibatan dari anggota masyarakat dalam kegiatan intervensi, sehingga perlu pembinaan kesadaran dan motivasi pada masyarakat lokal untuk mewujudkan kemampuan mereka dalam usaha bersama memperoleh kehidupan yang lebih baik (Hermawati, 2022)

Selain pengembangan masyarakat, langkah pemberdayaan masyarakat juga menjadi salah satu alternative untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Salah satu pemberdayaan yang dapat dilakukan yaitu pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi. proses pemberdayaan tidak terjadi dengan sendirinya, tetapi dengan keikutsertaan dan partisipasi masyarakat sehingga dapat berdaya guna. pemberdayaan berlangsung dan berhasil tidak hanya diperlukan partisipasi dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi saja, akan tetapi harus membangun manusianya pula supaya mampu menyesuaikan pikiran dan tindakannya dengan perkembangan yang terjadi dan memiliki rasa tanggung jawab serta ikut memelihara hasil-hasil atau upaya yang telah dilaksanakan.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara memberikan kebijakan pertambangan yang mengakomodasikan prinsip kepentingan nasional, kemanfaatan untuk masyarakat, jaminan berusaha. Untuk mencapai tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat maka perusahaan swasta nasional dan PMA dalam pelaksanaan pertambangan mineral dan batubara berkewajiban melaksanakan program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) (Ilmar, 2018). Tujuan dari program PPM ini untuk mensejahterakan masyarakat setempat yang berada dalam lingkaran tambang yang terkena dampak langsung akibat dari kegiatan operasional pertambangan. Program PPM merupakan salah satu kewajiban pemegang IUP dan IUPK yang merupakan bagian dari pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan. Kegiatan usaha pertambangan yang terdiri dari aspek perusahaan, aspek teknis dan lingkungan, dan aspek keuangan.

Program PPM berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat, maka seharusnya hal ini menjadi beban negara selain itu negara memiliki kemampuan dan tenaga ahli yang khusus mengurus bidang sosial dan pemberdayaan masyarakat. Seharusnya Pemerintah tidak hanya melaksanakan fungsi pengawasannya tetapi aktif dan langsung dalam pengelolaannya bersamasama dengan perusahaan dan masyarakat Undang-undang mineral dan batubara tidak secara eksplisit menyebut tanggung jawab sosial, tetapi

secara implisit menggunakan istilah program PPM. Sehingga pemahaman mengenai PPM ini belum sepenuhnya dipahami oleh semua pemangku kepentingan. Hal tersebut dikarenakan PPM belum begitu dikenal di beberapa instansi selain Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Seharusnya program PPM merupakan program terencana dan terukur dan yang mempunyai konsep pengembangan dan pemberdayaan masyarakat seperti program pendidikan, program kemandirian ekonomi, program pengelolaan lingkungan kehidupan masyarakat sekitar tambang. Sedangkan program yang bersifat tanggung jawab sosial perusahaan merupakan program kegiatan sosial seperti pembagian sembako, bantuan bencana alam, bantuan kedukaan kepada masyarakat yang sifatnya tidak terencana. (Muhamad Mu'iz Raharjo, 2021).

Pada observasi dan studi literatur yang dilakukan penulis setidaknya PPM memiliki 8 bidang pengembangan dan pemberdayaan yaitu; (1) pendidikan, (2) kesehatan, (3) tingkat pendapatan riil atau pekerjaan, (4) bidang kemandirian ekonomi, (5) bidang sosial budaya, (6) pemberiaan kesempatan kepada masyarakat setempat untuk ikut berpartisipasi dalam pengelolaan lingkungan kehidupan masyarakat sekitar tambang yang berkelanjutan, (7) pembentukan kelembagaan komunitas masyarakat dalam menunjang kemandirian PPM, dan (8) pembangunan infrastruktur yang menunjang PPM.

Pelaksanaan Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) dalam sektor pertambangan mineral dan batubara pada dasarnya merupakan kewajiban normatif perusahaan sebagai bagian dari tanggung jawab sosial dan lingkungan. Kewajiban tersebut ditegaskan dalam rezim hukum pertambangan nasional, khususnya setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Dalam undang-undang ini, perusahaan pemegang izin usaha pertambangan diwajibkan menyusun dan melaksanakan program PPM sebagai bagian dari komitmen keberlanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar wilayah tambang. Namun, dalam praktik di berbagai daerah, pelaksanaan PPM kerap menimbulkan persoalan implementatif. Salah satu isu utama adalah ketidaksesuaian antara program yang dirancang perusahaan dengan kebutuhan riil masyarakat desa terdampak. Program PPM sering bersifat top-down, berorientasi pada proyek fisik jangka pendek, serta kurang melibatkan partisipasi aktif pemerintah desa dan masyarakat dalam proses perencanaan. Akibatnya, PPM belum sepenuhnya menjadi instrumen pemberdayaan yang berkelanjutan, melainkan lebih menyerupai program bantuan sosial atau charity.

Persoalan tersebut semakin kompleks ketika dikaitkan dengan perubahan kewenangan pengawasan. Sebelum perubahan regulasi, pemerintah daerah termasuk pada level tertentu pemerintah kabupaten/kota memiliki ruang yang relatif lebih luas dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap aktivitas pertambangan di wilayahnya. Akan tetapi, setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, kewenangan perizinan, pembinaan, dan pengawasan pertambangan secara signifikan ditarik ke pemerintah pusat. Pemerintah desa tidak lagi memiliki kewenangan formal dalam pengawasan pelaksanaan kegiatan pertambangan, termasuk implementasi PPM.

Kondisi ini menimbulkan kesenjangan antara locus dampak dan locus kewenangan. Secara faktual, desa merupakan wilayah yang paling terdampak langsung oleh aktivitas pertambangan—baik dari sisi sosial, ekonomi, maupun lingkungan. Namun secara yuridis, desa tidak memiliki otoritas pengawasan yang memadai untuk memastikan bahwa kewajiban PPM benar-benar dilaksanakan sesuai kebutuhan masyarakat. Pemerintah desa seringkali hanya berperan sebagai penerima laporan atau pihak yang dilibatkan secara administratif, tanpa memiliki kekuatan regulatif untuk menegur atau merekomendasikan sanksi apabila terjadi penyimpangan pelaksanaan PPM.

Dari perspektif implementasi kebijakan publik, situasi ini dapat dianalisis sebagai persoalan koordinasi dan kapasitas institusional. Sentralisasi kewenangan pengawasan di tingkat pusat memang bertujuan untuk meningkatkan standardisasi dan kepastian hukum, namun dalam praktiknya dapat menimbulkan jarak birokratis (*bureaucratic distance*) antara pengawas dan objek yang diawasi. Pengawasan yang terpusat berisiko kurang responsif terhadap dinamika lokal, terutama ketika mekanisme pelaporan dari desa ke pusat tidak berjalan efektif atau ketika pengaduan masyarakat tidak segera ditindaklanjuti. Selain itu, absennya kewenangan formal desa dalam pengawasan PPM berpotensi melemahkan akuntabilitas sosial perusahaan. Dalam konteks tata kelola kolaboratif, pemerintah desa seharusnya menjadi aktor kunci dalam memastikan bahwa program pemberdayaan selaras dengan rencana pembangunan desa dan kebutuhan masyarakat. Tanpa dukungan kewenangan

pengawasan yang jelas, posisi tawar desa terhadap perusahaan menjadi relatif lemah, terutama dalam hal negosiasi prioritas program, besaran anggaran, maupun evaluasi dampak.

Dengan demikian, persoalan pelaksanaan PPM di daerah tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan perusahaan, tetapi juga menyangkut desain kelembagaan pengawasan pasca-sentralisasi kewenangan berdasarkan UU No. 3 Tahun 2020. Ke depan, diperlukan mekanisme koordinasi yang lebih integratif antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemerintah desa, serta penguatan partisipasi masyarakat dalam evaluasi PPM, agar kewajiban perusahaan tidak sekadar formalitas administratif, melainkan benar-benar menjadi instrumen transformasi sosial dan peningkatan kesejahteraan di wilayah terdampak pertambangan.

Salah satu perusahaan yang melaksanakan CSR dan PPM yaitu PT. Ceria Nugraha Indotama (CNI) yang bergerak di bidang pertambangan di Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara. Perusahaan ini beroperasi sejak Oktober 2017 dan telah mengeluarkan uang senilai 6 miliar untuk program-program CSR dan PPM untuk memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Dalam melaksanakan program PPM PT. Ceria Nugraha Indotama telah membentuk 3 kelompok pada bidang kemandirian ekonomi yaitu pengembangan komoditas desa, pengembangan ekonomi kreatif desa, dan bantuan infrastuktur usaha kecil pada wilayah ring 1 sekitar perusahaan.

Dalam peraturan pelaksanaan tersebut di atas menjabarkan program PPM merupakan bagian tata kelola perusahaan pertambangan mineral dan batubara sehingga pengawasannya dilakukan oleh Menteri. Pengaturan pengelolaan program PPM di masa yang akan datang tidak hanya sekedar slogan program hubungan relasi dengan masyarakat untuk memaksimalkan keuntungan perusahaan sebagaimana target utama dalam kegiatan dalam kegiatan bisnis, sehingga kegiatan PPM yang dilaksanakan oleh PT. Ceria Nugraha Indotama (CNI) yang bergerak di bidang pertambangan di Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara menjadi kewenangan pemerintah pusat dan meniadakan kewenangan pemerintah daerah apalagi pemerintah desa. Berdasarkan fakta aturannya perundang-undangan yang dipaparkan di atas menarik untuk dikaji dan dianalisis secara ilmiah.

B. Metodologi

Artikel ini merupakan luaran penelitian yang bertujuan mendeskripsikan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat (ppm) PT. Ceria Nugraha Indotama (CNI) dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat kecamatan Wolo kabupaten Kolaka, dengan menggunakan pisau analisis pengukuran efektifitas program yang meliputi; Pemahaman Program, Tepat Sasaran, Tepat Waktu, Tercapainya Tujuan, dan Perubahan Nyata (Wiwit, 2022). Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Denzin dan Lincoln penelitian kualitatif dilakukan dalam situasi alami (*natural setting*) dan peneliti berperan sebagai instrumen utama (Pettalongi, S.S. et al., 2025). Penentuan informan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tersebut dapat berupa pihak yang dianggap paling mengetahui tentang apa diharapkan peneliti, atau mengalami langsung peristiwa yang menjadi fokus penelitian. Data diperoleh melalui wawancara, observasi dan studi dokumentasi, kemudian data-data tersebut dianalisis dengan menggunakan prosedur yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman yaitu, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan (verifikasi data).

C. Hasil dan Pembahasan

Dalam penelitian ini akan mengkaji dan menganalisis mengenai program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) yang diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan merupakan bagian dari kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara, dengan melihat seberapa efektif pelaksanaan program PPM yang dilaksanakan oleh PT. Ceria Nugraha Indotama, menggunakan indikator pengukuran efektivitas program yakni Pemahaman Program, Tepat Sasaran, Tepat Waktu, Tercapainya Tujuan, dan Perubahan Nyata (Wiwit, 2022).

Pemahaman Program

Pemahaman program merupakan kemampuan dari PT. Ceria Nugraha Indotama (CNI) untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat terkait program PPM, sehingga diharapkan menimbulkan partisipasi yang aktif dari masyarakat yang diberdayakan. Penelitian ini akan melihat seberapa baik masyarakat di kecamatan Wolo memahami program PPM. Kita akan mencari tahu apakah masyarakat tahu tentang tujuan dan cara kerja program ini. Dengan memahami hal ini, kita bisa mengetahui apakah masyarakat berpartisipasi aktif dalam program tersebut. Penelitian ini akan menganalisis pelaksanaan program PPM yang diatur dalam UU Pertambangan 1967, UU 35 Minerba 2009 dan UU Minerba Perubahan 2020 sehingga memberikan maksud dan tujuan program PPM tersebut. Berikut wawancara yang dikemukakan oleh perwakilan PT.CNI, yang menyatakan tentang indikator pertama yakni pemahaman program, "...bahwa ada 8 indikator yang mencakup PPM yang diberikan, dan ada 8 aspek program dan itu di akumulasi 5 tahun kedepan, dan telah di jelaskan ke pemerintah, Dasarnya awalnya yakni potensi dan dilakukan pemetaan dan dilakukan musyawarah kepada Masyarakat dan hasil tersebut yang dijadikan landasam dalam memberikan PPM atau menjalankan dengan melihat potensi ekonomi desa, infrastruktur desa dan SDM desa, dan edukasi kesehatan dserta bantuan makanan bergizi, dilakukan pembagian menjadi 2 zona. Zona 1 terdiri dari 6 desa dan 2 kelurahan sedangkan zona 2 terdiri dari 8 desa. Selanjutnya dilakukan pendampingan yang dilakukan oleh penyuluh yang berasal dari perusahaan serta monitoring secara rutin. program unggulan PPM yakni sosial budaya, Pendidikan, E-kraf (bid pertanian) UMKM, Kesehatan, dan Lingkungan. Agar masyarakat sebagai sasaran pelaksanaan PPM ini bisa memahami maka langkah-langkah yg ditemuh adalah; sosialisasi berkala di pertemuan-pertemuan di tingkat desa sekaligus rapat dengar pendapat dan masukan dari masyarakat dan pemerintah desa, memasang baleho yang berisi informasi kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada program PPM..."

Pernyataan tersebut di atas terkonfirmasi dengan beberapa pernyataan masyarakat terkait adanya program ini. Beberapa masyarakat yang diwawancarai penulis menyatakan bahwa mereka sangat bersyukur dengan hadirnya PT. CNI di daerah mereka, banyak masyarakat yang menjadi karyawan dan kami memperoleh program PPM yang membantu masyarakat baik dari hal pendidikan, ekonomi dan UMKM. Ini disampaikan oleh pihak perusahaan sewaktu kami menghadiri rapat di kantor desa dan juga penjelasan di beberapa Baleho bahwa ada program PPM untuk membantu dalam pemberdayaan masyarakat desa.

Dari hasil wawancara tersebut di atas serta pengamatan penulis maka dapat disimpulkan bahwa dalam hal indikator pemahaman program ini cukup efektif dan berhasil terlaksana.

Ketepatan Sasaran

Ketepatan sasaran yaitu ketepatan pemberian bantuan program pemberdayaan kepada masyarakat yang dianggap sangat layak untuk menerima bantuan berdasarkan pengujian beberapa kriteria kelayakan yang dilakukan oleh PT. CNI sebagai bentuk pelaksanaan program PPM. Program pengembangan dan Pemberdayaan masyarakat menjadi kewajiban dari perusahaan untuk membangun sekelompok orang pada area pertambangan serta menanggulangi kejadian mendesak. Kegiatan PPM beraneka macam bidang utama salahsatunya pada pembangunan Sumber Daya Manusia. Hasil wawancara kepada perwakilan PT. CNI menegaskan bahwa "...kami melakukan *mapping social* berlandaskan peraturan pemerintah juga Kegiatan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat yang telah dilakukan perusahaan secara rutin dalam berbagai pilar. Secara aktif, perusahaan pun mendengarkan aspirasi masyarakat sekitar lokasi operasional dalam menyusun setiap rencana kegiatan yang dilakukan ini. Guna menyelenggarakan kegiatan pengembangan dan pemberdayaan yang sesuai kebutuhan masyarakat tepat sasaran, serta berdampak positif bagi berbagai pihak, PT.Ceria Nugraha Indotama (CNI) terus melaksanakan kegiatan safari Bersama masyarakat di 12 desa dan 2 kelurahan sebagai ring 1 dan 2 untuk berdiskusi terkait program PPM dibidang keagamaan, sosial budaya dan lingkungan serta potensi yang perlu dikembangkan..."

Berdasarkan wawancara maka dijelaskan bahwa ketepatan sasaran melalui program PPM pada masyarakat yang berada pada zona 1 dan zona 2 kecamatan Wolo, sebelumnya CNI melakukan *mapping social* Sesuai berlandaskan peraturan pemerintah juga Kegiatan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat yang telah dilakukan perusahaan secara rutin dalam berbagai pilar. Secara aktif, perusahaan pun mendengarkan aspirasi masyarakat sekitar lokasi operasional dalam menyusun setiap rencana kegiatan yang dilakukan ini. Guna menyelenggarakan kegiatan pengembangan dan pemberdayaan yang sesuai kebutuhan masyarakat serta berdampak positif bagi berbagai pihak, CNI terus melaksanakan

kegiatan safari bersama masyarakat di 12 desa dan 2 kelurahan ring 1 dan 2 untuk berdiskusi terkait program PPM dibidang keagamaan, sosial budaya dan lingkungan serta potensi yang perlu dikembangkan.

Dari hal yang dipaparkan di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa indikator ketepatan sasaran dalam pelaksanaan program PPM sudah baik sehingga pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang telah diprogramkan berjalan dengan efektif.

Ketepatan Waktu

Tepat waktu adalah pelaksana program PPM dilaksanakan sesuai jadwal dan rencana, sehingga dapat diukur. Penyusunan kegiatan dalam pelaksanaan program PPM PT. CNI di kecamatan Wolo, melibatkan pemangku kepentingan baik dari pihak pelaksana program, pemerintah desa dan perwakilan masyarakat dari 2 zona. Berikut hasil wawancara penulis kepada pihak perusahaan yang menyatakan "... bahwa pelaksanaan kegiatan sesuai dengan waktu yang telah disepakati bersama pada waktu pemetaan sosial serta musyawarah dengan pendapat dengan Masyarakat, apalagi banyak kegiatan yang sifatnya pemberdayaan masyarakat yang berarti masyarakat sendiri yang terlibat langsung pada kegiatan PPM ini. Jikapun terdapat kegiatan yang terpaksa molor akibat satu dan lain hal akan tetapi tidak mengurangi dari manfaat dan tujuan akhir dari program...."

Sebagai bukti keberhasilan pelaksanaan program PPM ini, PT. CNI mempromosikan produk-produk UMKM binaan perusahaan di level internasional dengan ikut partisipasi sebagai *exhibitor pada event the 3rd Nickel producers, processors dan buyers conference*. Melalui pembinaan UMKM ini, PT. CNI berkomitmen untuk menciptakan keberlanjutan ekonomi dengan melibatkan masyarakat ataupun stakeholder perusahaan dalam setiap kegiatannya. Konsep inilah yang mulai dibangun oleh perusahaan dalam menjalankan program PPM-nya, yakni dengan konsep *creating shared value (CSV)* yang membentuk sebuah peluang baru dan kesempatan berbagi sebuah nilai dengan masyarakat. Sehingga tujuan PT. Ceria untuk dapat memberikan bukti nyata manfaat keberadaan perusahaan terhadap masyarakat di Kecamatan Wolo dapat terwujud secara nyata dan bukan konsep belakang. Selain itu, program-program CSR-PPM ini juga mencakup pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, fasilitas kesehatan, dan pendidikan.

Upaya ini tidak hanya membantu dalam meningkatkan aksesibilitas dan layanan dasar bagi masyarakat, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru dan mendorong pertumbuhan usaha lokal. Dengan demikian, keberadaan perusahaan pertambangannikel di Kecamatan Wolo tidak hanya berdampak pada peningkatan perekonomian masyarakat, tetapi juga pada peningkatan kualitas hidup secara keseluruhan.

Tercapainya Tujuan

Tercapainya tujuan dapat dilihat dari peningkatan kesejahteraan masyarakat, perekonomian masyarakat, motivasi hidup keluarga dan mengentaskan kemiskinan setelah mendapatkan program PPM dari PT. Ceria Nugraha Indotama (CNI). Program PPM yang dijalankan perusahaan juga berfokus pada pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Melalui inisiatif penghijauan, konservasi sumber daya air, dan pengelolaan limbah yang baik, perusahaan berupaya meminimalkan dampak negatif aktivitas pertambangan terhadap lingkungan. Dengan demikian, selain memberikan manfaat ekonomi, program ini juga memastikan bahwa sumber daya alam tetap terjaga untuk generasi mendatang. Keterlibatan aktif masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program-program ini memastikan bahwa kebutuhan dan aspirasi mereka terpenuhi, menciptakan rasa kepemilikan dan keberlanjutan jangka panjang dari manfaat yang diperoleh. Semua upaya ini memperlihatkan bahwa perusahaan pertambangan nikel di kecamatan Wolo tidak hanya berfokus pada keuntungan ekonomi semata, tetapi juga pada kesejahteraan sosial dan kelestarian lingkungan.

Pada wawancara yang dilakukan kepada pihak PT.CNI menjelaskan "...bahwa banyak sekali program PPM yang telah dilakukan bukan hanya 1 isu tapi berbagai macam isu salah satu yang menjadi prioritas adalah di bidang kesehatan PT.CNI berkomitmen meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang ada di lingkungan tambang baik itu lansia, ibu hamil, balita dan sebagainya ditahun 2024 kami sudah melakukan kegiatan yang namanya *medical free* atau pengobatan gratis yang dilaksanakan di 8 desa di kecamatan Wolo, kami juga melakukan giat posyandu, pemberian makanan bergizi pencegah stunting serta kami juga melakukan pelatihan manajemen bencana. sedangkan untuk kegiatan pemberian makanan tambahan tujuannya adalah kita akan mencoba mensuplay atau memberikan edukasi kepada orang tua balita untuk selalu memodifikasi makanan-makanan tambahan yang diberikan kepada balita tersebut. kemudian kami juga sudah melakukan peningkatan kapasitas kader, tujuannya adalah

menjadi leader atau pendamping bidan desa di desa tersebut untuk membantu meningkatkan atau mensosialisasikan bahwa pentingnya peningkatan kesehatan....”

Pernyataan dari pihak perusahaan tersebut di atas dibenarkan oleh masyarakat sebaagaimaanaa hasil wawancara peenulis kepada berapa masyarakat. Mereka menyatakan bahwa adanya program PPM dari PT.CNI memberikan batuan dari segi ekonomi dan kesehatan. Dengan adanya pengobatan gratis dapat mengurangi biaya untuk pengobatan, karena selain masyarakat yang mendapatkan obat gratis belita juga mendapatkan PMT (pemberian Makanan Tambahan). Dampak positif dengan adanya program PPM masyarakat yang memiliki BPJS dan yang tidak memiliki BPJS bisa mendapatkan obat secara gratis.

PT. Ceria Indotama nugraha melakukan upaya pendampingan kerja yang dimana peningkatan kapasitas menjadi fokus yang dilaksanakan di PPM seperti pendekatan kapsitas kelompok tani, perikanan, kelembagaan (PKK, karangtaruna), kader kesehatan Bidan, pembuatan snak lokal. Program Pengembangan dan pemberdayaan Masyarakat yang telah di lakukan oleh PT. Ceria Indotama nugraha sudah dilaksanakan sesuai dengan yang di rencanakan atau yang dibutuhkan masyarakat melalui sosialisasi program dan proses equipment melibatkan masyarakat selum melakukan program dengan cara bersosialisasi dengan stakeholder sesuai dengan prioritas dan potensi yang ada sesuai dengan kebutuhan yang ada Dampak positif yang di rasakan oleh masyarakat sekitar tambang adalah dengan adanya keberadaan PT. Ceria Nugraha Indotama bagi masyarakat sangat memberi rmanfaat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan perekonomian khususnya di wilayah ring satu dengan program-program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat.

Perubahan Nyata

Perubahan nyata ialah pola perilaku keluarga yang telah menerima program PPM, dengan meningkatnya etos kerja serta keterampilan sehingga mampu lebih mandiri membiayai kebutuhan dan tidak sepenuhnya bergantung pada bantuan PT. Ceria Nugraha Indotama secara periodik.

Dalam bidang kemandirian ekonomi PT.CNI mempunyai komitmen besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan dalam hal ini perusahaan turut serta mendorong kemandirian ekonomi masyarakat lingkaran tambang adapun program yang dilaksanakan PT.CNI dalam hal kemandirian ekonomi adalah bekerja sama dengan masyarakat dan memberdayakan UMKM salah satunya UMKM Madu Trigona, perusahaan melalui program PPM melakukan edukasi kepada UMKM dalam haal teknik budidaya madu Trigona, pengolahan dan pengemasan, sampai pada pemasaran dan kewirausahaan.

Selain itu sebagai upaya untuk mengurangi dampak sosial yang timbul dari aktivitas kegiatan penambangan, PT. CNI mempunyai komitmen untuk terus mendukung keberlanjutan setiap aktivitas masyarakat dibidang sosial dan budaya di sekitar wilayah pertambangan. Maka dari itu perubahan nyata yang ikut dirasakan masyarakat itu banyak sekali khususnya pada infrastruktur, kesehatan dan pendidikan. Penerapan program PPM yang dilakukan oleh PT.CNI dalam program peningkatan kemandirian ekonomi dapat dilihat dari keterangan dari PT.CNI “.....untuk pendekatan ekonomi kami berkomitmen dengan memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk berkontribusi dalam menunjang kebutuhan PTT.CNI dengan menjadi *supplier* khususnya dari kecamatan wolo kita mengambil bahan pokok itu untuk kebutuhan makan karyawan PT. CNI itu dari supplier di warung kelontong di kecamatan wolo hal ini sebagaai peningkatan perputaran ekonomi sekitar area perusahaan...”

Berdasarkan wawancara yang dilakukan maka dapat di simpulkan bahwa keberadaan PT. Ceria Nugraha indotama bagi masyarakat adalah yaitu meningkatkan kesejahteraan, meningkatkan perekonomian khususnya diwilayah ring satu dengan program-program PPM”. Serta komitmen memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk berkontribusi dalam menunjang kebutuhan PT. CNI memberikan kesempatan untuk *supplier* khususnya dari Kecamatan wolo kita mengambil bahan pokok itu untuk kebutuhan makan karyawan CNI itu dari supplier tokoh-tokoh yang ada di warung tokoh kelontong di kecamatan Wolo hal ini sebagaai peningkatan perputaran ekonomi sekitar area Perusahaan.

D. Kesimpulan

Bersumber pada hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik kesmpulan bahwa PT. Ceria Nugraha Indotama dalam penerapan program PPM, terdapat delapan program kerja yang dijalankan dengan baik. ada tiga batasan masalah dalam program PPM diantaranya program kesehatan, program

pendidikan, dan program kemandirian Ekonomi, Pada program kesehatan tujuannya adalah untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang ada dilingkar tambang. Pada program pendidikan PT. Ceria Nugraha Indotama memberikan bantuan Beasiswa, bantuan tenaga pendidik, memberikan buku-buku perpustakaan terkait pertambangan. Pada program kemandirian Ekonomi oleh PT. Ceria Nugraha Indotama menjalankan Program berupa kesempatan bekerja/tenaga kerja, program UMKM, program snack lokal, dan pemberian bibit ikan, pada program sosial budaya melakukan seminar dan tindak lanjut CSR dan peduli lingkungan lingkar tambang, program CSR lebih spesifik pada isu pertambangan berkelanjutan dan diberikan pemahaman serta seminar berkelanjutan, sedangkan program terakhir infrastruktur yakni pembuatan mesjid, jalan dan layanan kesehatan Program PPM ini sebagai Tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat Kecamatan Wolo dalam aspek ekonomi ini dilakukan bagi perusahaan secara berkelanjutan.

Pada penerapan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat PT. Ceria Nugraha Indotama bahwa, program tersebut memiliki dampak positif yang dapat dirasakan oleh masyarakat kecamatan Wolo sehingga segala bentuk program PPM PT.CNI di kecamatan Wolo telah efektif. Selain itu respon positif juga telah disampaikan kepada masyarakat terkait program PPM yang telah dikasikan PT. Ceria Nugraha Indotama, selain respon positif masyarakat juga memberikan saran terkait program PPM.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Solichin, REVISI 2019. Analisis Kebijakan (Dari Formulasi ke. Implementasi Kebijakan Negara). Jakarta, Bumi Aksara
- Arifin, Zainal. (2019). Evaluasi Pembelajaran. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Budiani, Ni Wayan. Jurnal Ekonomi Dan Sosial, Vol.2, No.1, 2019: Efektivitas Program Penanggulangan Pengangguran Karang Taruna “Eka Taruna Bhakti” Desa Sumerta Kelod Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar. Bali: Departemen Ilmu Ekonomi Universitas
- Eko, Sutoro, 2019. Pemberdayaan Masyarakat Desa. Rineka Cipta, Jakarta
- Hajaroh, M. 2019. Pohon Teori Evaluasi Kebijakan dan Program. Foundasia, 27- 42.
- Hamid, Ir Hendrawati. 2019. Manajemen Pemberdayaan Masyarakat. Makassar: De La Macca.
- Himawan S Pambudi, dkk, 2019, Politik Pemberdayaan; Jalan Mewujudkan Otonomi Desa, Lapera Pustaka Utama, Yogyakarta.
- Karding, Abd. Kadir. 201. Evaluasi pelaksanaan program Bantuan operasional sekolah (BOS) Sekolah menengah pertama negeri Di kota semarang. Universitas Diponegoro Semarang
- Mahmudi. 2019. Manajemen Kinerja Sektor Publik, Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Mardiasmo. 2019. Efisiensi dan Efektifitas Pajak. Jakarta: Andy.
- Maskun, H. Sumitro. 2019. Pembangunan Masyarakat Desa, Azas Kebijakan Dan Manajemen. Yogyakarta: M.W. Mandala.
- Mutiarin, Dyah dan Arif Zainudin. 2019. Manajemen Birokrasi dan Kebijakan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-09/MBU/07/2015 Tahun 2015. Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.
- Pettalongi, S. S., Muas, M., Arafat, A., & Ndaomanu, D. N. (2025). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Campuran Teori Dan Praktik*. Media Penerbit Indonesia.
- Priansa, Donni Juni dan Garnida, Agus. 2019. Manajemen Perkantoran Efektif, Efisien, dan Profesional, Bandung: Alfabeta.
- Sambas, Ali Muhidin. 2019, Konsep Efektivitas Pembelajaran, Pustaka Setia, Bandung.
- Steers, Richard M. 2019. Efektifitas Organisasi. Jakarta: Erlangga
- Sugiyono. 2020. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: ALFABETA.
- Suhartini, Imam Khambali, and Abd Basyid. 2018. Model-Model Pemberdayaan Masyarakat. Yogyakarta: Pustaka Pesantren
- Sumodiningrat. 2019. Pembangunan Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat. PT, Bina Rena Pariwisata; Jakarta
- Supriyatna Tjahya. 2019. Birokrasi Pemberdayaan dan Pengentasan Kemiskinan. Bandung: Penerbit Humaniora Utama Press (HUP) Anggota IKAPI.

Tika, Moh. Pabundu. 2014. Budaya Organisasi dan Peningkatan Kinerja Perusahaan, Jakarta: Bumi Aksara.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Minerba

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM.

Wiwit Rizqi Fauziah, dkk (2022) Efektivitas program wirausaha pemuda dalam upaya penurunan angka pengangguran terbuka di kabupaten tegal pada masa pandemi covid-19. Jurnal Manajemen Vol. 14

Yusuf, Choirul Fuad. 2018 Efektifitas Pokjawas dan Kinerja Pengawas Pendidikan Agama Islam, Cena Citasatria, Jakarta.